

Tawuran Sering Terjadi di Ibu Kota, Arifin: Ini Solusi Pencegahannya

JAKARTA (IM) - Aksi tawuran antar-kelompok remaja maupun pelajar yang terjadi di Jakarta sering membuat korban luka dan meninggal dunia.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) DKI, Arifin mengatakan, tawuran yang terjadi Jakarta bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian maupun Satpol PP.

Arifin mengaku, tawuran merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk orangtua, remaja serta pemangku kepentingan.

"Jadi seharusnya bagaimana kemudian membangun ketahanan lingkungan yang baik, dengan mengikutsertakan semua warga yang ada di lingkungan itu untuk sama-sama menjaga kenyamanan, ketertiban,"

ujarnya, Kamis (1/2).

Schingga, kata Arifin antisipasi tawuran harus melibatkan seluruh unsur supaya menciptakan situasi yang aman dan nyaman.

"Jadi di situ harusnya membangun ketahanan lingkungan untuk keamanan bersama semua pihak yang ada di lingkungan itu juga ikut harus menjaga dan bertanggung jawab," terangnya.

Arifin menambahkan, pihaknya bersama aparat kepolisian dan TNI sudah rutin melakukan patroli di malam hari. Namun, para pelaku tawuran biasanya beraksi ketika tidak dijaga oleh aparat gabungan.

"Ya iya, sekarang tetap berjalan tapi paling tidak patroli rutin tetap berjalan, ya patroli rutin tetap berjalan," ungkapnya. ● yan

Fahira Idris Dorong Kepulauan Seribu Jadi Sentra Produksi Ikan Kerapu

JAKARTA (IM) - Bukan cuma wisata bahari, Kepulauan Seribu memiliki potensi ekonomi yang besar dalam perikanan yang digerakkan oleh nelayan. Selain perikanan tangkap, Kepulauan Seribu punya potensi besar dalam budidaya ikan kerapu.

Oleh karena itu, perlu ada program berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian dan lingkungan hidup. Hal ini untuk memastikan potensi besar budidaya ikan kerapu menjadi tulang punggung ekonomi yang mampu menyejahterakan semua nelayan di Kepulauan Seribu.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Fahira Idris mengungkapkan, ikan kerapu yang banyak terdapat di daerah perairan Kepulauan Seribu bernilai ekonomi tinggi.

"Ikan kerapu sangat layak untuk menjadi pilihan utama nelayan di Kepulauan Seribu," kata Fahira Idris saat bertemu nelayan di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (30/1) lalu.

Ia bertemu nelayan di sela-sela kunjungan kerja DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meski bernilai ekonomi tinggi, kata Fahira Idris, ikan kerapu memiliki pembibitan dan pembiakan yang praktis. Ikan ini juga dapat dipanen setelah 5-6 bulan masa budidaya. Untuk itu, Fahira Idris menyatakan, membudidayakan ikan kerapu menjadikan solusi efektif peningkatan kesejahteraan nelayan, profesi yang menjadi mata pencaharian utama warga Kepulauan Seribu.

Ia pun ingin menjadikan Kepulauan Seribu sebagai sentra produksi ikan kerapu nasional dengan nelayan menjadi penggerak utamanya. Hal ini harus menjadi fokus kita bersama. "Saya mendorong berbagai program pemberdayaan

nelayan terutama budidaya ikan kerapu menjadi prioritas dengan memperluas lahan budidaya, menyediakan jaringan dan benih, pelatihan, pendampingan, dan inovasi serta teknologi," ujar Fahira Idris.

"Selain itu, program bantuan modal bagi nelayan untuk berwirausaha budidaya ikan kerapu harus semakin ditingkatkan dan diperluas," ujar Fahira Idris dalam siaran persnya, Kamis (1/2).

Menurut Fahira Idris, beberapa kendala dalam pembudidayaan ikan kerapu di Kepulauan Seribu harus dicarikan solusinya agar dapat terus berkembang pesat. Adapun beberapa kendala yang saat ini dihadapi, seperti keterbatasan lokasi budidaya yang sesuai dan dampaknya terhadap lingkungan.

"Sudah saatnya para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di DKI Jakarta melakukan inovasi budidaya ikan kerapu mulai dari teknologi, manajemen, dan keberlanjutan untuk menjamin efisiensi produksi, kualitas produk, dan keberlanjutan lingkungan," kata Fahira Idris.

Fahira Idris mengatakan, bukan suatu hal yang mustahil jika budidaya ikan kerapu di Kepulauan Seribu bisa menjelma menjadi industri, seperti budidaya ikan salmon di Norwegia. Ia mengatakan, saat ini, budidaya ikan salmon di Norwegia telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

"Ekspor salmon Norwegia yang merupakan hasil budidaya (dan) saat ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara tersebut, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang mulai dari nelayan hingga petani pakan ikan," kata Fahira Idris.

"Jika kita fokus kepada inovasi dan pengembangan pasar, bukan tidak mungkin Kepulauan Seribu menjadi salah satu penghasil ikan kerapu terbesar bagi pasar dunia," ujarnya. ● pp

4 | Metropolis

FOTO: ANT



APEL SIAGA PSDKP KKP

Sejumlah AKP Dirjen PSDKP KKP memberi hormat kepada kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Orca 02 di Dermaga Ex Presiden, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/2). Apel untuk menunjukkan kesiapsiagaan seluruh korps PSDKP KKP dari segi sarana, prasarana, dan teknologi pengawasan dalam mengawal kebijakan ekonomi biru untuk Indonesia emas.

Soal Kampung Bayam, Jakarta Barometer Ingatkan Jakpro Jangan Cuci Tangan

Persoalan Kampung Susun Bayam belakangan berstatus sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO), seharusnya dijelaskan ke publik sejak awal. Namun menurutnya, Jakpro seolah enggan masyarakat tahu akar persoalan sebenarnya.

JAKARTA (IM) - Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing meminta

Pj Gubernur DKI Jakarta mencopot Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jak-

pro), Iwan Takwin beserta jajaran lainnya karena tidak dapat menuntaskan persoalan Kampung Susun Bayam (KSB).

Jim menilai polemik Kampung Susun Bayam merupakan skenario politik yang sudah disusun sejak KSB diresmikan pada tahun 2022, atau dua hari menjelang Anies lengser dari kursi Gubernur DKI.

Ia juga menduga Jakpro hingga kini masih dipenuhi orang dalam Anies Baswedan

yang menjadi bagian dari instrumen pemenangan pilpres.

"Ini bukan barang baru, kalau memang beritikad baik terhadap warga Kampung Bayam, harusnya Jakpro siap dan tuntas regulasi atau apapun itu sebelum KSB gantung pita. Jangan kemudian, seolah-olah ini sengaja dibiarkan sampai akhirnya terkesan warga dizalimi. Jakpro yang cuci tangan, Pj yang kecipratan," ujar Jim dalam keterangannya, Kamis (1/2).

Lebih lanjut, Jim mengatakan persoalan KSB yang belakangan berstatus sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) seharusnya dijelaskan ke publik sejak awal. Namun menurutnya, Jakpro seolah enggan masyarakat tahu akar persoalan sebenarnya.

"Jakpro diam, Iwan Takwin diam, ini ada apa? baru dua atau tiga hari ini dia mau bicara buka sedikit demi sedikit info penting yang bisa meneduhkan publik. Kalau seandainya Jakpro mau bicara di awal, eh ini statusnya bukan buat rusuh sewa ya tapi HPPO, warga harus jadi pekerja dulu baru bisa tinggal. Ini sampaikan secara transparan, agar clear," ungkapnya.

Jim juga mengaku kecewa dengan para pejabat lama Jakpro yang terlibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Sebab, Jim mengatakan mereka mengerti latar belakang kunci rumah di KSB yang belum diserahterimakan ke warga.

"Atau jangan-jangan di-design agar barang ini panjang lalu jadi tema Pilpres nih? Kalau ya demikian, ini parah ini Pj mesti ambil sikap tegas, bersihin Jakpro sekarang juga. Kalau terlambat kasih obat, penyakitnya bisa menular ke BUMD yang lain," papar Jim.

Selain itu, Jim mengingatkan seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan manuver aneh yang dapat mengganggu pelayanan masyarakat. Apalagi menjelang Pemilu, di mana Jakarta akan selalu menjadi barometer nasional.

"Kami melihat pun masih banyak pejabat ASN dan BUMD yang cawe-cawe dengan Gubernur lama, atau Capres saat ini ya. Menurut saya harusnya itu tidak terjadi. Mereka mestinya fokus kerja melayani rakyat. Jangan aji mumpung, mumpung masih Pj nih, kerjain aja sekalian. Nah tradisi jelek di ASN DKI," pungkasnya. ● yan

WARGA: DISHUB TOLONG NGACA!

Apa Lapak Parkir Liar di Dekat Stasiun Langgar Aturan

JAKARTA (IM) - Hari (25), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta seharusnya berkaca lebih dulu sebelum menyalahkan masyarakat yang membuka lahan parkir di sekitar stasiun.

Menurutnya, keberadaan tempat parkir tidak resmi disebabkan karena adanya permintaan. "(Dishub) tolong berkaca dulu. Kenapa mereka bisa ada? Apa mungkin fasilitas resmi yang disediakan belum memadai? Atau lokasi parkir yang terlalu jauh?" kata Hari, Kamis (1/2).

Hari mencontohkan tempat parkir non resmi di sekitar Stasiun Lenteng Agung. Tak sedikit warga yang bermukim di Setu Babakan dan sekitarnya yang memarkirkan kendaraan di lokasi tak resmi karena parkir di stasiun terlalu jauh.

"Warga Jagakarsa kalau ke parkir di stasiun harus muter dulu di tapal kuda. Belum macetnya, belum bensinnya. Makanya setahu saya banyak yang menipitkan motor di lokasi tak resmi. Jadi dia tinggal nyabrang saja ke stasiun," tutur dia.

Oleh karena itu, harus ada solusi dari Dishub jika pada akhirnya melarang tempat parkir non resmi beroperasi. Misal, membuat lahan parkir yang lebih mudah untuk dijangkau dari wilayah Jagakarsa. "Kalau salah, solusinya apa. Diperbanyak saja lahan parkir resminya misal. Tapi ya harus ada langkah konkretnya," imbuh Hari.

Sementara itu, warga lain bernama Ifan (26), menilai, parkir tak resmi bisa menjadi penyelamat bagi dirinya.

Sebab, tak jarang parkir resmi yang ada di stasiun kapasitasnya terlalu minim.

"Saya rasa parkir liar di sekitar stasiun sangat membantu. Apalagi yang stasiunnya memiliki lahan parkir terbatas atau tak ada sama sekali," ungkap dia.

Hanya, tempat parkir tak resmi terkadang mematok harga yang terlalu tinggi. Ketika hanya parkir sejam, harganya dipatok sama rata.

"Misal parkir cuma sejam, tapi kan disamaratakan sama yang lain. Jadi kayak rugi saja. Tapi, kalau nitipnya lama, kita sedikit diuntungkan," tutup dia. ● yan

UNTUK MANFAATKAN BAHAN BAKAR SAMPAH

DLH DKI Jakarta Gandeng Dua Pemasok Industri Semen

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menggandeng dua pemasok (offtaker) industri semen untuk memanfaatkan bahan bakar hasil pengolahan sampah (*refused derived fuel*/RDF).

"Kerja sama pemanfaatan bahan bakar sampah dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian antara Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu (BLUD UPS) dengan dua perusahaan off-taker industri semen," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis (1/2).

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari uji coba pemanfaatan bahan bakar sampah oleh Industri semen PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk (PT Indocement) dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) pada Juni 2023.

Menurut Asep kerja sama ini merupakan langkah maju Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanganan sampah.

"Ini merupakan langkah strategis dan semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam pengolahan sampah," ujar Asep.

Awal pembangunan pabrik RDF, kata Asep banyak mendapat kritikan dan pandangan negatif dari berbagai pihak. Namun, DLH DKI bisa membuktikan bahwa kualitas RDF yang dihasilkan sesuai dengan standar dan bisa diterima oleh industri semen.

"Fasilitas RDF Plant berskala besar seperti ini belum ada sama sekali di Indonesia. Uji coba atau *trial and error* melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya mencapai tahap kerja sama," ucap Asep.

Asep berharap dengan adanya kerja sama ini bisa membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur PT Indocement, Hasan Imer mengapresiasi DLH DKI Jakarta yang mampu memproduksi RDF sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Melalui ujicoba yang sudah berlangsung dari Juni 2023, kata Hasan, akhirnya pihaknya bersama DLH DKI bisa memulai untuk memaksimalkan penggunaan RDF secara komersial.

Hasan menyebut kerja sama ini merupakan upaya mengurangi emisi karbon sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi sampah.

"Kerja sama ini bukan hanya kesepakatan bisnis tapi sebagai komitmen bersama untuk mengurangi sampah," kata Hasan.

Lalu, Direktur Manufacturing SBI Soni Asrul Sani menyebut kerja sama ini merupakan wujud untuk memaksimalkan penggunaan energi alternatif yang sejalan dengan tujuan SBI.

Bahan bakar alternatif seperti RDF ini, menurut Asrul bisa menggantikan bahan bakar utama yang selama ini digunakan.

"Kita akan memaksimalkan penggunaan RDF sebagai upaya menuju transisi ke energi alternatif," ujar Soni. ● yan

FOTO: ANTARA



PAMERAN PERNIKAHAN TERBESAR DI INDONESIA

Pengunjung melihat contoh gaun pengantin yang ditampilkan di ajang pameran pernikahan Bridestory Market 2024 di ICE BSD, Kab. Tangerang, Banten, Kamis (1/2). Pameran yang berlangsung hingga Minggu (4/2) tersebut menawarkan berbagai jasa pernikahan dari sejumlah vendor pernikahan mulai dari tempat, catering, dekorasi, fotografi hingga gaun pengantin.

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE

Bahwa perjanjian pembiayaan :

No.	Brand, Type & Color	Year	Transmission	Police Number
1	MERCEDES BENZ C 200 CGI (CKD) HITAM METALIK 2012	2012	A/T	B 1282 SEE
2	SUZUKI ST150 - PICK UP HITAM 2018	2018	M/T	B 9932 FAS
3	SUZUKI A1J310F GL (4x2) (KARIMUN WAGON R) ABU ABU METALIK 2017	2017	M/T	L 1106 PO
4	HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E CKD PUTIH 2016	2016	M/T	AB 1506 DJ
5	HONDA HONDA BR-V 1.5 E CVT CKD HITAM MUTIARA 2018	2018	A/T	D 1837 UAS
6	NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV PUTIH 2012	2012	A/T	B 2481 TGY
7	DAIHATSU GRANDMAX S401RV-ZMDEJJ HJ SILVER METALIK 2018	2018	M/T	AB 1652 RY
8	DAIHATSU PICKUP S402RP-PMRFJJ-KJ SILVER METALIK 2018	2018	M/T	N 8746 WE
9	DAIHATSU Ayla 1.0 M MT (B100RS-GMDFJ) ABU ABU METALIK 2019	2019	M/T	L 1891 JT
10	DAIHATSU F601RV-GMDFJJ (XENIA) SILVER METALIK 2010	2010	M/T	D 1386 MR
11	DAIHATSU Ayla 1.0 X PUTIH 2013	2013	M/T	B 1164 TRV
12	SUZUKI KARIMUN A1J310F GX (4X2) PUTIH METALIK 2013	2013	M/T	B 1726 KZC
13	TOYOTA ALPHARD 2.4 G HITAM METALIK 2012	2012	A/T	B 2260 ZBC
14	SUZUKI YV4 1.2 RHD (4x2) - Splash ABU ABU METALIK 2011	2011	M/T	AD 1281 CR
15	NISSAN Evalia 1.5 4X2 SILVER METALIK 2012	2012	M/T	H 1091 HA
16	DAIHATSU XENIA 1.3R F653 RV-GMDFJ PUTIH 2016	2016	M/T	AB 1265 NH
17	DAIHATSU SIGRA B401RS-GMQFJ 1.2 X PUTIH 2016	2016	M/T	AB 1651 FY
18	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD MERAH 2019	2019	A/T	B 1768 WYQ

telah cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 12 Februari 2024. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual dan di perhitungn kembali.

Hormat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670